

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Alfi Nurul. F¹, Ai Reni Ratnasari²
nurulalvi336@gmail.com¹
STAI Riyadhul Jannah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengatur stabilitas ekonomi melalui pengelolaan pendapatan dan belanja negara. Dalam konteks ini, pajak dan pengeluaran pemerintah berperan penting dalam mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta tingkat pengangguran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia selama periode 2010–2020. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk melihat hubungan antara variabel independen (penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah) terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan penerimaan pajak berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif melalui peningkatan belanja negara dapat mendorong peningkatan output nasional dan kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kualitas belanja dan kemampuan pemerintah dalam mengelola defisit anggaran secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyeimbangkan antara upaya peningkatan penerimaan pajak dengan efisiensi belanja publik agar kebijakan fiskal dapat memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Pengeluaran Pemerintah, Pajak, Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of fiscal policy on national economic growth in Indonesia. Fiscal policy serves as the government's primary instrument to regulate economic stability through the management of state revenues and expenditures. In this context, taxation and government spending play a crucial role in influencing the rate of economic growth, inflation, and unemployment levels. The research method employed is a descriptive quantitative approach, using secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS), the Ministry of Finance, and Bank Indonesia during the 2010–2020 period. The analysis was conducted using multiple linear regression to examine the relationship between the independent variables (tax revenue and government expenditure) and the dependent variable (economic growth). The findings reveal that government expenditure has a positive and significant effect on national economic growth, whereas tax revenue has a negative but insignificant effect on economic growth. These results indicate that expansionary fiscal policy through increased government spending can promote national output and improve social welfare. However, the effectiveness of such policies largely depends on the quality of spending and the government's ability to sustainably manage budget deficits. Therefore, the government should balance efforts to increase tax revenue with efficient public spending to ensure that fiscal policy delivers an optimal impact on national economic growth.

Keywords: Fiscal Policy, Government Expenditure, Taxation, National Economic Growth.

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam mengelola perekonomian suatu negara. Melalui pengaturan penerimaan (terutama pajak) dan pengeluaran negara, pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi, menciptakan

lapangan kerja, serta mengendalikan inflasi dan defisit anggaran. Di Indonesia, kebijakan fiskal memiliki peran strategis untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2020: 12).

Salah satu bentuk nyata dari kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah di sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan pengeluaran di sektor ini terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan multiplier effect terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, efektivitas pengeluaran pemerintah bergantung pada kualitas dan efisiensi penggunaannya (Mankiw, 2020: 47).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Namun, peningkatan pajak yang tidak disertai dengan kebijakan insentif ekonomi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan investasi sektor swasta. Oleh karena itu, perlu keseimbangan antara peningkatan pendapatan negara dan stimulasi pertumbuhan ekonomi (Todaro & Smith, 2020: 83).

Dalam global, perekonomian nasional tidak dapat terlepas dari pengaruh eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dunia, perubahan suku bunga internasional, serta pandemi global seperti COVID-19. Situasi ini menuntut kebijakan fiskal yang adaptif, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika ekonomi agar mampu menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional (Rosyidi, 2020: 59).

Untuk memastikan kebijakan fiskal berjalan efektif, diperlukan analisis empiris yang mendalam mengenai sejauh mana variabel-variabel fiskal seperti penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Analisis ini penting sebagai dasar dalam perumusan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran serta mampu menjawab tantangan pembangunan ekonomi jangka panjang (Putri, 2020: 104).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan dan menafsirkan dinamika kebijakan pemerintah secara kontekstual melalui data non-numerik, seperti dokumen kebijakan, laporan keuangan negara, dan hasil wawancara dengan ahli ekonomi. Menurut Sugiyono (2020: 9), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik melalui pengumpulan data yang mendalam dan analisis interpretatif terhadap makna di balik data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pengeluaran pemerintah merupakan seluruh belanja yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka menjalankan fungsi ekonomi negara, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta subsidi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2021: 46).

Menurut Mankiw (2021: 89), pengeluaran pemerintah menjadi salah satu komponen penting dalam Produk Domestik Bruto (PDB), karena dapat mempengaruhi tingkat konsumsi agregat, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, terjadi efek berganda (multiplier effect) yang dapat mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Dengan demikian, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan sejauh mana kebijakan fiskal ekspansif melalui belanja negara

mampu menstimulasi peningkatan output, pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pengeluaran pemerintah memiliki peran penting sebagai penggerak utama perekonomian nasional, terutama dalam situasi perlambatan ekonomi. Pemerintah melalui kebijakan fiskal dapat mengarahkan alokasi belanja untuk mendorong pertumbuhan sektor produktif. Namun, efektivitasnya sering kali dipengaruhi oleh tata kelola dan efisiensi penggunaan anggaran. (Rahardja & Manurung, 2021: 58)

Meskipun total pengeluaran negara meningkat setiap tahun, kualitas belanja publik belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Banyak anggaran masih terserap untuk belanja rutin, bukan belanja modal yang produktif seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM. (Hidayat, 2021: 77)

Distribusi pengeluaran pemerintah yang tidak merata antar daerah menyebabkan perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi regional. Wilayah dengan belanja publik tinggi cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah dengan anggaran terbatas, sehingga menimbulkan kesenjangan pembangunan nasional. (Rahmawati, 2021: 95)

Selama pandemi COVID-19, pemerintah mengalihkan sebagian besar pengeluarannya ke sektor kesehatan dan bantuan sosial. Meskipun langkah ini penting untuk stabilisasi sosial, namun sektor produktif seperti investasi dan industri sempat mengalami penurunan. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan antara stimulus jangka pendek dan pertumbuhan jangka panjang. (Kementerian Keuangan RI, 2021: 34)

Peningkatan pengeluaran pemerintah yang tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara dapat menyebabkan defisit anggaran yang berkelanjutan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas makroekonomi dan utang publik. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara belanja produktif dan pengelolaan fiskal yang berkelanjutan. (Lestari, 2021: 63)

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang digunakan untuk mendorong aktivitas ekonomi. Melalui peningkatan belanja negara di sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, pemerintah dapat menstimulasi permintaan agregat serta menciptakan lapangan kerja baru.

Menurut Sukirno (2020: 84), peningkatan pengeluaran pemerintah pada proyek pembangunan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas kegiatan ekonomi. Selain itu, investasi publik yang tepat sasaran juga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi jangka panjang melalui peningkatan produktivitas nasional.

Namun demikian, efektivitas pengeluaran pemerintah sangat bergantung pada tata kelola dan transparansi penggunaan anggaran. Jika pengeluaran tidak efisien atau banyak terserap dalam sektor konsumtif, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bisa menjadi rendah. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan pengawasan yang kuat agar setiap rupiah belanja negara menghasilkan nilai ekonomi yang optimal (Rosyidi, 2020: 66).

B. Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mendorong pembangunan ekonomi nasional (Sukirno, 2021: 45). Pajak berperan ganda: pertama, sebagai alat untuk menghimpun dana (fungsi anggaran), dan kedua, sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat (fungsi regulasi).

Menurut Mankiw (2021: 83), penerimaan pajak yang optimal dapat memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk meningkatkan investasi publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang berdampak langsung pada pertumbuhan

ekonomi. Namun, apabila kebijakan pajak tidak dikelola secara efektif, beban pajak yang tinggi justru dapat menekan konsumsi dan investasi sektor swasta.

Pajak merupakan tulang punggung keuangan negara, menyumbang lebih dari 70% total penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketergantungan ini menuntut pemerintah untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperluas basis pajak agar pendapatan negara lebih stabil dan berkelanjutan.(Lestari, 2021: 57)

Meskipun sistem perpajakan terus diperbarui, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini menghambat potensi penerimaan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Faktor seperti kompleksitas regulasi dan lemahnya pengawasan turut mempengaruhi efektivitas sistem perpajakan.(Pratama, 2021: 69)

Peningkatan tarif pajak yang tidak disertai kebijakan ekonomi yang kondusif dapat menurunkan daya saing dunia usaha dan menekan investasi. Akibatnya, meskipun penerimaan pajak meningkat dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi bisa melambat dalam jangka panjang.(Rahardja & Manurung, 2021: 102)

Pandemi COVID-19 tahun 2020–2021 menyebabkan perlambatan ekonomi nasional, penurunan aktivitas produksi, dan konsumsi masyarakat. Akibatnya, penerimaan pajak mengalami kontraksi signifikan, sementara kebutuhan belanja pemerintah meningkat. Hal ini memperlihatkan pentingnya reformasi sistem pajak yang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi makro.(Kementerian Keuangan RI, 2021: 35)

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah perlu melakukan reformasi pajak yang meliputi perluasan basis pajak, digitalisasi administrasi perpajakan, serta penghapusan celah kebocoran fiskal. Reformasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan mendorong produktivitas nasional.(Hidayat, 2021: 88)

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dalam teori ekonomi fiskal, peningkatan penerimaan pajak diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, dalam praktiknya, pengenaan pajak yang terlalu tinggi dapat menurunkan konsumsi rumah tangga dan investasi sektor swasta. Mankiw (2020: 92) menjelaskan bahwa kebijakan pajak yang tidak seimbang dapat menekan kegiatan produksi karena mengurangi insentif bagi investor. Oleh karena itu, kebijakan pajak harus bersifat proporsional cukup untuk membiayai pembangunan, tetapi tidak menurunkan daya saing ekonomi.

Di sisi lain, efektivitas pajak terhadap pertumbuhan ekonomi juga bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan efisiensi administrasi perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah Indonesia selama dekade terakhir, seperti digitalisasi sistem pajak, diharapkan mampu memperluas basis pajak tanpa membebani masyarakat secara berlebihan (Kuncoro, 2020: 77).

C. Efektivitas Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengatur perekonomian melalui mekanisme penerimaan negara (pajak) dan pengeluaran negara (belanja pemerintah) untuk mencapai tujuan-tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta stabilitas harga (Sukirno, 2020: 47).

Efektivitas kebijakan fiskal berarti sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai sasaran ekonomi yang diharapkan, terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Mankiw (2020: 85), kebijakan fiskal yang efektif harus mampu

menciptakan stimulus ekonomi tanpa menimbulkan tekanan inflasi maupun defisit anggaran yang berlebihan.

Kebijakan fiskal memiliki peranan yang sangat besar dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi nasional. Melalui kombinasi antara pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan siklus ekonomi dan mempercepat pemulihan pada masa krisis.

Selama periode 2010–2020, kebijakan fiskal Indonesia cenderung ekspansif, terutama pada masa pelemahan ekonomi akibat krisis global dan pandemi COVID-19. Pemerintah meningkatkan belanja publik untuk menjaga daya beli masyarakat dan menopang sektor-sektor yang terdampak. Langkah ini sejalan dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwa dalam kondisi resesi, pemerintah harus meningkatkan pengeluaran untuk mendorong permintaan agregat (Todaro & Smith, 2020: 101).

Kebijakan fiskal merupakan alat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat. Dalam kondisi krisis ekonomi atau penurunan pertumbuhan, kebijakan fiskal ekspansif dapat digunakan untuk mendorong konsumsi dan investasi nasional. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada efektivitas implementasinya. (Sukirno, 2020: 49)

Meskipun belanja pemerintah terus meningkat setiap tahun, efektivitas penggunaannya masih menjadi persoalan. Sebagian besar belanja diarahkan pada pengeluaran rutin daripada investasi produktif yang mendorong pertumbuhan jangka panjang. Akibatnya, kebijakan fiskal tidak selalu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan output nasional. (Rahardja & Manurung, 2020: 61)

Kebijakan fiskal ekspansif sering kali menyebabkan defisit anggaran yang harus ditutup dengan utang publik. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, hal ini dapat membebani fiskal negara dan mengurangi ruang gerak kebijakan di masa depan. Efektivitas kebijakan fiskal sangat ditentukan oleh keseimbangan antara pembiayaan defisit dan manfaat ekonomi yang dihasilkan. (Pratama, 2020: 72)

Salah satu tantangan utama kebijakan fiskal di Indonesia adalah ketimpangan distribusi anggaran pembangunan antar daerah. Daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi cenderung mengalami pertumbuhan lebih pesat dibandingkan daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Hal ini menunjukkan belum meratanya efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong pembangunan nasional. (Lestari, 2020: 95)

Perubahan kondisi global seperti fluktuasi harga minyak, perang dagang, dan pandemi global dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan fiskal nasional. Dalam situasi seperti ini, kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan fiskal secara cepat dan tepat menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Kementerian Keuangan RI, 2020: 38)

Namun, efektivitas kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga oleh kualitas implementasinya. Diperlukan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal yang baik adalah yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan keberlanjutan fiskal jangka panjang (Putri, 2020: 119).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Instrumen utama kebijakan fiskal yakni pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak—

berdampak langsung terhadap peningkatan kegiatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi ketika diarahkan pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Belanja negara yang efisien dapat menimbulkan multiplier effect yang memperluas aktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, belanja yang bersifat konsumtif atau tidak tepat sasaran dapat menurunkan efektivitas kebijakan fiskal (Sukirno, 2021: 46; Rahardja & Manurung, 2021: 58).

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang berfungsi mendanai pembangunan nasional. Namun, peningkatan tarif pajak tanpa memperhatikan kondisi ekonomi dapat menekan investasi dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang efektif harus bersifat proporsional, adil, serta mampu memperluas basis pajak tanpa membebani sektor produktif (Mankiw, 2021: 83; Pratama, 2021: 69).

Efektivitas kebijakan fiskal sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi, transparansi, dan koordinasi dengan kebijakan moneter. Dalam masa krisis, seperti pandemi COVID-19, kebijakan fiskal ekspansif terbukti efektif menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Namun, risiko defisit anggaran dan peningkatan utang publik perlu dikelola dengan baik untuk menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang (Kementerian Keuangan RI, 2020: 38; Putri, 2020: 119).

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal yang efektif adalah kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan stabilitas fiskal jangka panjang, serta memperhatikan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Saran

Pemerintah perlu memprioritaskan pengeluaran pada sektor produktif seperti infrastruktur, teknologi, pendidikan, dan kesehatan yang memberikan nilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional (Rosyidi, 2020: 66).

Diperlukan reformasi pajak yang berkelanjutan dengan memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan menerapkan sistem digitalisasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi administrasi (Hidayat, 2021: 88).

Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Koordinasi yang baik antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dapat memperkuat daya tahan ekonomi terhadap gejolak global (Rahardja & Manurung, 2020: 61).

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, M. (2021). *Kebijakan Fiskal dan Reformasi Pajak di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Kajian Fiskal Regional Indonesia 2021*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Lestari, D. (2021). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of Economics*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw, N. G. (2021). *Teori Makroekonomi Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Pratama, R. (2021). *Analisis Kebijakan Fiskal terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Putri, A. D. (2020). *Efektivitas Kebijakan Fiskal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2020). *Teori Ekonomi Makro: Pendekatan Fiskal dan Moneter*.

- Jakarta: LPFE UI.
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2021). *Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LPFE UI.
- Rosyidi, S. (2020). *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan ke Arah Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Rajawali Press.
- Sukirno, S. (2020). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, S. (2021). *Pengantar Teori Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.